



**PENGUATAN PERTUMBUHAN INKLUSIF DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL
(Studi Kasus Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah)**

***Stengthening of Inclusive Growth in the New Normal Period to Increase the National
Resilience (Case Studies In The Province Of Central Java)***

HETTYCA ASTUNINGDYAS¹, HAERUDIN², BUDI SUGITO³

¹Pengadministrasi Perencanaan dan Program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang,
astuningdyas@yahoo.com, 085640473792

²Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah,
haerudinpoldagri@yahoo.com, 081325172570

³Pt. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang,
sugitobudi6@gmail.com, 085640090555

ABSTRAK : Pandemi covid- 19 menimbulkan dampak di berbagai aspek kehidupan manusia, tidak hanya kesehatan tetapi juga ekonomi. Di Provinsi Jawa Tengah, pandemi covid-19 semakin meningkatkan kompleksitas permasalahan kemiskinan. Masa adaptasi kebiasaan baru menjadi momentum tepat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Penguatan pertumbuhan inklusif diharapkan dapat mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan lokus penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang difokuskan pada data tahun 2019,2020 dan prediksi tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 3(tiga) strategi yaitu optimalisasi kesempatan kerja atau peluang ekonomi, keadilan akses kesempatan kerja dan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiga strategi tersebut sudah tepat dalam menjawab akar permasalahan di Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan Provinsi Jawa Tengah akan semakin tangguh dan mampu mewujudkan visi Provinsi Jawa Tengah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” serta berkontribusi optimal terhadap peningkatan ketahanan nasional bangsa.

Kata kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Inklusif, Adaptasi Kebiasaan Baru, Ketahanan Nasional, Provinsi Jawa Tengah

ABSTRACT: *The Covid-19 pandemic has an impact on various aspects of human life, not only health but also the economy. In Central Java Province, the Covid-19 pandemic has further increased the complexity of the problem of poverty. The period of new normal is the right momentum to improve the people's economy. It is hoped that the strengthening of inclusive growth can overcome the complexity of the problem of poverty. The purpose of this study is to describe the strategy of strengthening inclusive growth in a period of new normal carried out by the Central Java Provincial Government in overcoming the complexity of poverty problems. This study used a qualitative case study method with research loci in Central Java Province. The data collection technique used is a literature study that focuses on data for 2019,2020 and predictions for 2021. The results show that efforts to strengthen inclusive growth during the adaptation period for new normal carried out by Central Java Province are divided into 3 (three) strategies, namely optimization of opportunities. employment or economic opportunities, fair access to job opportunities and social safety networks for all levels of society. Based on the research results, it can be concluded that the three strategies are correct in answering the root of the problem*



in Central Java Province so that it is hoped that Central Java Province will be stronger and able to realize the vision of Central Java Province "Towards a Prosperous and Independent Central Java" and contribute optimally to increasing the nation's national resilience.

Keywords: *Poverty, Inclusive Growth, New Normal, National Resilience, The Province Of Central Java*

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 datang dengan sangat tiba-tiba dan mengejutkan. Pandemi ini berhasil mengubah tatanan kehidupan sosial, politik dan budaya masyarakat dengan cepat. Pada aspek kesehatan, pandemi ini merupakan ancaman bagi kesehatan manusia karena penularan dan penyebarannya cepat dengan resiko kematian. Pada aspek ekonomi, melemahnya kinerja perekonomian global yang ditandai dengan penurunan aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa serta adanya pembatasan aktivitas dan mobilitas manusia menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran, kemiskinan dan semakin tingginya ketimpangan ekonomi masyarakat.

Tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir. Sebagai jalan tengah antara permasalahan kesehatan dengan ekonomi, pemerintah memberlakukan kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru oleh WHO diartikan sebagai sebuah skenario yang mengizinkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan tetap menjaga kesehatan melalui berbagai protokol kesehatan selama vaksin virus belum ditemukan[1]. Dengan adaptasi

kebiasaan baru, masyarakat diharapkan dapat tetap produktif dan sehat.

Masa adaptasi kebiasaan baru dapat menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang terpuruk di masa pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -5,32% (yoy) [2] pada triwulan II tahun 2020, demikian pula Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kontraksi sebesar -5,94% (yoy) [3]. Dalam upaya memperbaiki kinerja perekonomian dan menangani kompleksitas dampak ekonomi pandemi covid-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru diperlukan pendekatan yang tepat yang diharapkan dapat menyentuh akar permasalahan.

Pendekatan ekonomi inklusif melalui penguatan pertumbuhan inklusif dapat menjadi pendekatan yang tepat dalam menjawab isu strategis di Jawa Tengah terkait dengan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks sebagai dampak pandemi covid-19. Penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru diharapkan dapat meningkatkan ketahanan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi pandemi covid-19, mewujudkan visi Provinsi Jawa Tengah yaitu "Menuju Jawa Tengah Berdikari dan Semakin

Sejahtera” dan berkontribusi optimal dalam peningkatan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani permasalahan kemiskinan guna meningkatkan ketahanan nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus deskriptif yang bertujuan menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita atas suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Studi kasus dalam penelitian ini ialah pertumbuhan inklusif di Provinsi Jawa Tengah di masa adaptasi kebiasaan baru. Metode pengambilan data yang digunakan ialah studi pustaka yang berfokus pada data tahun 2019, 2020 dan prediksi tahun 2021 yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk ketiga terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 34.718.204 jiwa pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,473 juta pada tahun 2019 [4]. Sebaran

penduduk miskin di Jawa Tengah masih didominasi di wilayah pedesaan. Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan khususnya pada kelompok sasaran petani (buruh petani, petani gurem dan pekerja serabutan) dan kelompok nelayan (buruh nelayan nelayan kecil). Penduduk tersebut tersebar di 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yang memiliki 576 kecamatan dan 8.559 desa/ kelurahan [4].

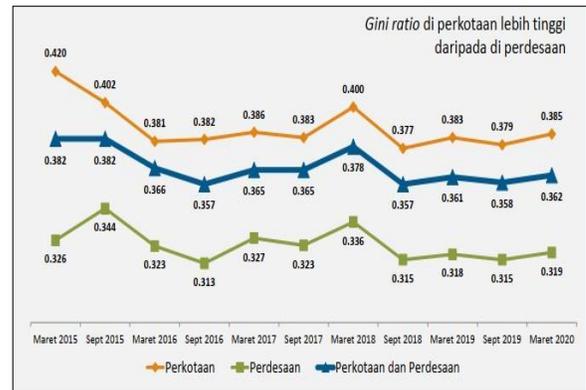
Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan berhasil dalam menangani kemiskinan bahkan pada tahun 2019 menjadi Provinsi dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Keberhasilan tersebut bukan berarti bahwa permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah telah paripurna, masih terdapat beberapa permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; masih lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan; dan masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan.

Pandemi covid-19 yang datang pada awal tahun 2020 menambah kompleksitas

permasalahan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah. Pandemi covid-19 menyebabkan turunnya permintaan domestik dan ekspor, turunnya konsumsi rumah tangga, dan melemahnya kinerja lapangan usaha utama terutama industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pariwisata dan konstruksi[5]. Berdasarkan data dari BPS, pada Februari 2020 terjadi peningkatan pengangguran sebanyak 0,80 juta orang, atau bertambah sebesar 2,56% (yoy) dibandingkan dengan Februari 2019 yang berjumlah 0,78 juta orang[3]. Oleh Bank Indonesia, jumlah pengangguran diprediksi akan terus meningkat sebesar 1,43 % dari angkatan kerja Provinsi Jawa Tengah[3]. Persentase kemiskinan juga mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2020 sebesar 11,41 % dimana pada Maret 2019 sebesar 10,80 %. Kondisi tersebut jika tidak segera diatasi akan berdampak pada ketimpangan kesejahteraan masyarakat dimana pada Maret 2020 koefisien gini Jawa Tengah sebesar 0,362 naik sebesar 0,001 dibandingkan Maret 2019 [6].



Gambar 1. Grafik Persentase Kemiskinan Di Jawa Tengah Maret 2015 s.d Maret 2020 [6]



Gambar 2. Tren *Gini Ratio* Provinsi Jawa Tengah Maret 2015 s.d Maret 2020 [6]

Berdasarkan data dan fakta tersebut, penguatan pertumbuhan inklusif menjadi pendekatan yang tepat dalam mengatasi permasalahan peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Masa adaptasi kebiasaan baru di mana terjadi pelonggaran aktivitas dan mobilitas masyarakat menjadi momentum tepat untuk segera bergegas mengatasi berbagai permasalahan ekonomi tanpa mengabaikan kesehatan masyarakat.

Pertumbuhan inklusif merupakan konsep pertumbuhan dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan inklusif menurut UNDP didefinisikan sebagai proses dan hasil pertumbuhan dimana semua pihak dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dari pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan inklusif merepresentasikan pemerataan. Selain pemerataan, pertumbuhan inklusif juga menitikberatkan pada penekanan angka kemiskinan, hal ini sebagaimana pendapat Habito(2009) bahwa pertumbuhan inklusif

didefinisikan sebagai pertumbuhan GDP yang dapat menurunkan kemiskinan [7]. Dalam pertumbuhan inklusif, faktor ketimpangan, kemiskinan, dan tenaga kerja menjadi ukuran keberhasilan. Suatu daerah dikatakan berhasil dalam pelaksanaan pertumbuhan inklusif jika dapat menurunkan kemiskinan, menurunkan distribusi ketimpangan pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja[7].

Penguatan pertumbuhan inklusif menjadi satu pendekatan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran yang semakin kompleks akibat pandemi covid-19. Berdasarkan hasil penelitian, Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai program kegiatan dalam upaya penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru guna meningkatkan ketahanan nasional . Upaya penguatan pertumbuhan inklusif tersebut dapat dikategorikan dalam 3 strategi yaitu optimalisasi kesempatan atau peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, keadilan akses terhadap kesempatan kerja dan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Optimalisasi Kesempatan Kerja atau Peluang Ekonomi Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat

Pertumbuhan inklusif beriringan dengan peningkatan kesempatan kerja produktif dan juga pemerataan penanaman modal[8]. Dalam upaya optimalisasi kesempatan kerja atau peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa program yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi utamanya investasi industri padat karya dan pelibatan yang lebih luas UMKM Jawa Tengah dalam *supply chain industri* di Jawa Tengah serta membuka akses pasar tenaga kerja bagi pencari kerja milenial. Dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah, terdapat delapan titik industri unggulan Provinsi Jawa Tengah yaitu Kedungsapur, Wanarakuti, Subosukowonosraten, Bergasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor [9].

Tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi optimalisasi kesempatan kerja adalah menjaga kelestarian lingkungan di tengah maraknya alih fungsi lahan pertanian ke kawasan industri, pembangunan industri ramah lingkungan, semakin banyaknya pabrik yang pindah ke Provinsi Jawa Tengah, kemudahan investasi melalui omnibuslaw dan memastikan setiap industri yang ada di Jawa Tengah patuh akan protokol kesehatan dalam kegiatan operasionalnya.

Disisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk terus membangun desa agar memiliki daya tarik secara ekonomi. Daya tarik tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas masyarakat desa sehingga mampu mengentaskan

kemiskinan di pedesaan mengingat kemiskinan di Jawa Tengah masih didominasi oleh desa sebesar 12, 80 % dibandingkan dengan perkotaan sebesar 10, 99 % pada Maret 2020 [6]. Hal tersebut dapat dilakukan dengan fasilitasi usaha mikro/kecil serta usaha rintisan yang bersinergi dengan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.

Optimalisasi Keadilan Akses Kesempatan Kerja

Optimalisasi keadilan akses terhadap kesempatan kerja dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap kesempatan kerja. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah antara lain Sekolah Tanpa Sekat yang bertujuan memastikan semua anak dapat bersekolah, pengembangan dan penguatan BLK yang sesuai kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan peningkatan kompetensi dunia usaha dalam pelatihan ketrampilan yang berbasis *link and match* melalui kemitraan dan penyelarasan kurikulum sekolah menengah kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta penyerapan tenaga kerja yang telah dilatih [10]. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah menekan ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia antar Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah sehingga terjadi pemerataan kualitas SDM. Pada tahun 2019, IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dimana IPM tertinggi adalah Kota Semarang

sebesar 83,19 dan terendah adalah Kabupaten Brebes sebesar 66,12 [4].

Optimalisasi keadilan akses dan kesempatan kerja serta peluang ekonomi diharapkan dapat menjawab permasalahan pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) di Provinsi Jawa Tengah.

Optimalisasi Jaringan Pengaman Sosial Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat

Optimalisasi jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat menjawab permasalahan masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*). Dalam upaya optimalisasi jaringan pengaman sosial bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa program yaitu peningkatan akses pendidikan melalui efektivitas beasiswa siswa miskin, pemberian bantuan seragam bagi siswa miskin; akses kesehatan melalui pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota, stimulan jamban sehat; akses infrastruktur dasar melalui stimulan peningkatan kualitas rumah sederhana layak huni, stimulan pembangunan baru rumah sederhana layak huni, penyiapan rusunawa serta perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan sambungan listrik untuk rumah tangga miskin; akses KB melalui peningkatan kesertaan penggunaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi pra Keluarga Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera kategori 1(satu); kemudahan akses kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat kurang mampu yang mengarah pada upaya validasi perbaikan data penduduk miskin; penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam panti provinsi dan panti milik masyarakat agar PPKS memiliki kapasitas kemandirian, pemberian dan perluasan bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera; akses transportasi melalui tarif murah untuk buruh yang menggunakan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan [10].

Tantangan dalam optimalisasi jaringan pengaman sosial ialah permasalahan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di semua Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Tengah, validasi data kemiskinan secara periodik, efektifitas sistem pengawasan secara partisipatif dan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.

Penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi kesempatan kerja atau peluang ekonomi, keadilan akses kesempatan kerja, dan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat menekan angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan pemerataan di Provinsi Jawa Tengah serta meningkatkan ketangguhan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan Jawa

Tengah sebagai Provinsi yang berdikari dan semakin sejahtera di masa adaptasi kebiasaan baru yang berujung pada peningkatan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Upaya penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai respon atas peningkatan kompleksitas permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat dikategorikan dalam 3 strategi yaitu optimalisasi kesempatan kerja atau peluang ekonomi, keadilan akses kesempatan kerja dan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiga strategi tersebut sudah tepat dalam menjawab akar permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin kompleks sebagai dampak pandemic covid-19 yaitu *basic needs access*, *sustainable livelihood* dan masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan.

Penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru selanjutnya harus diimbangi dengan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyikapi berbagai tantangan terkait implementasi berbagai program kegiatan tersebut sehingga upaya penguatan pertumbuhan inklusif diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi pandemi covid-19, mewujudkan Jawa Tengah yang berdikari

dan semakin sejahtera dan berkontribusi pada peningkatan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Purwanto E.A & Emilia Ova. (2020). *New Normal Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*. Yogyakarta : UGM Press.
- [2] BPS. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen*. Jakarta : BPS RI
- [3] Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Agustus 2020*. Semarang : Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- [4] BPS Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2020*. Semarang : BPS Jateng.
- [5] Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2020). *Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2020*. Semarang : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
- [6] BPS Provinsi Jawa Tengah.(2020). *Berita Resmi Statistik*. Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.
- [7] Amalina DH, Hutagaol MP & Asmara A. (2013). *Pertumbuhan Inklusif : Fenomena Pertumbuhan Inklusif Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Volume 2 No 2. Hal 85 s.d 112*.
- [8] Kusumaningrum S, Yuhan RJ. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif Dan Faktor Yang Memengaruhinya*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Volume 10 No 1. Hal 1-17*.
- [9] Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah.
- [10] Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021